

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian,1994). Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah dan pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 yang dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak saat itu pemerintah dan pembangunan daerah diseluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Otonomous yang berarti pengaturan sendiri dan pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi menyangkut 2 hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan

kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian diatas maka otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarunjang,2000). Hak dan wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara garis besar otonomi daerah terbagi dua yaitu Desentralisasi Pembangunan dan Desentralisasi Fiskal.

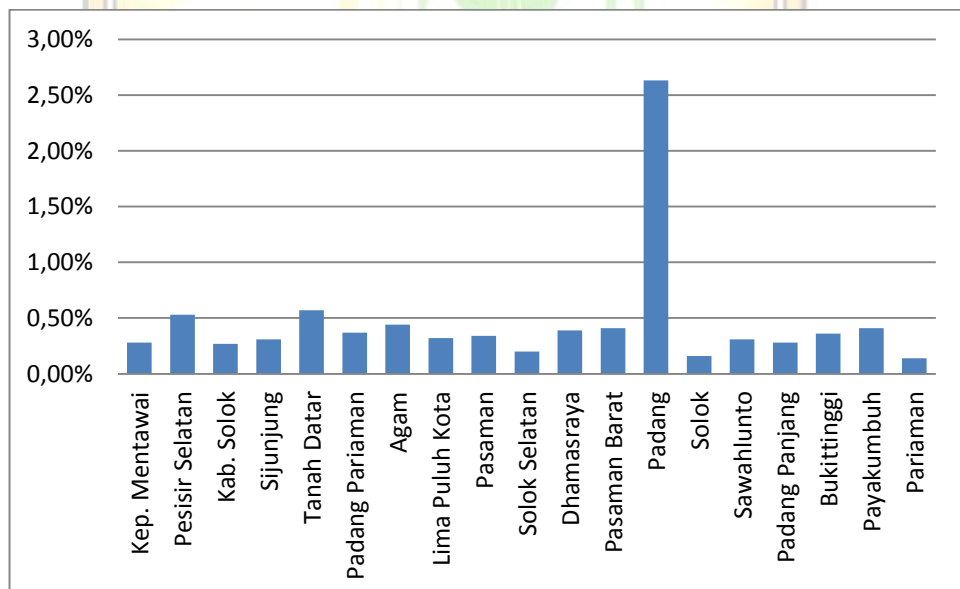
Desentralisasi pembangunan merupakan pelimpahan wewenang pengelolaan pembangunan lebih banyak kepada pemerintah daerah terutama Kabupaten dan Kota. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dibatasi hanya pada 5 sektor saja yaitu Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negri, Fiskal dan Moneter, Peradilan dan Agama. Sedangkan provinsi diberikan otonomi terbatas dalam pengelolaan pembangunan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang meliputi sektor Perkebunan, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Kehutanan.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui UU No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pemerintah mencoba untuk meningkatkan sumber dana untuk mendukung proses pembangunan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya nasional. Implementasi desentralisasi fiskal menuntut agar pemerintah daerah menggali sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD). Sumber-sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah serta juga memberikan gambaran mengenai kesanggupan suatu daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pemerintah daerah harus serius dalam mengoptimalkan penerimaan PAD.

Provinsi Sumatra Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota dimana setiap Kabupaten dan Kota memiliki besaran Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda. Jumlah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota terhadap Penerimaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatra Barat masih relatif kecil walaupun APBD Provinsi tiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Gambar 1.1**  
**Porsi Penerimaan PAD Antar Kabupaten/Kota Terhadap APBD**  
**Provinsi Sumatra Barat Tahun 2014 (persentase)**



Sumber: SUMBAR Dalam Angka 2015

Perbedaan besaran porsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat terhadap APBD Provinsi Sumatera

Barat pada Gambar 1.1 menyebabkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan antar Kabupaten/Kota seperti dibidang ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Maka untuk itu perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah daerah sangat disadari oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah.

Salah satu komponen PAD yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar bagi keuangan daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Syofian, 1997).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan terutang oleh yang wajib pajak, pembayarannya tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung.. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial bagi Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. Pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal seperti sekarang ini, fungsi dan peranan pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD terasa sangat penting dalam perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Meningkatkan penerimaan pajak daerah tentunya akan meningkatkan PAD antar Kabupaten/Kota sehingga hal ini berimbas meningkatnya APBD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat relatif rendah tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2%. Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 menjadi daerah dengan penerimaan pajak terendah yaitu sebesar 25.012.298 miliar rupiah dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 2,1%. Kemudian disusul oleh Kota Pariaman dengan penerimaan pajak sebesar 25.853.798 miliar rupiah dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 2,5%. Masih rendahnya penerimaan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Penerimaan pajak daerah disebabkan oleh beberapa faktor yang diduga mempengaruhinya. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Veronica Winarti Agustiningtyas dengan periode waktu penelitian dari tahun 1998 sampai 2001 menyatakan bahwa jumlah wisatawan, PDRB Perkapita, jumlah hotel dan daya listrik tersambung mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Stevanus Irvan Prasetyo dengan periode waktu penelitian dari tahun 2011 sampai 2014 menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB

Perkapita mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dengan periode waktu penelitian dari tahun 1980 sampai 2000 menyatakan bahwa variabel pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah penduduk dan jumlah industri mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Dari variabel-variabel yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang dikemukakan di atas, penulis hanya membatasi tiga variabel saja yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang akan penulis teliti yaitu jumlah penduduk, PDRB Perkapita, dan jumlah industri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB Perkapita terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Industri terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah dapat kita ketahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB Perkapita terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Industri terhadap penerimaan Pajak Daerah kabupaten/Kota di Sumatera Barat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan perekonomian selanjutnya.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini berguna untuk memfokuskan dan mengarahkan penelitian kepada masalah yang diteliti. Ruang lingkup penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat periode 2005-2014. Wilayah atau studi kasus penelitian adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat, yaitu 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam meneliti

hubungan variabel dependen dan independen adalah 10 tahun (2005–2014). Untuk memenuhi syarat analisis serta menjawab permasalahan dari penelitian ini maka peneliti menggunakan kombinasi data tahunan (time series) antar daerah Provinsi Sumatera Barat (cross section) yang dibentuk menjadi sebuah data panel untuk pengolahan lebih lanjut. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang dapat diperoleh di Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

#### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam pembahasan di bab selanjutnya.



### Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

### Bab IV Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian meliputi keadaan penerimaan pajak daerah, keadaan penduduk, perekonomian. Pada bab ini juga membahas perkembangan masing-masing variabel di Provinsi Sumatera Barat.

### Bab V Hasil Dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis dari hasil pengolahan data. Pada bab ini juga menguraikan hasil dari beberapa uji untuk kelengkapan penelitian.

### Bab VI Penutup

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran yang diperlukan.

